

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU

LAURA BRIGIDA TIWI¹, Dr. Dedi Kusnadi, M.Si², Dr. Rupita, M.Kes²
Universitas Tanjungpura

1. Mahasiswa Program Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

Abstrak

Tujuan penelitian adalah ingin mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas proses implementasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan. Penelitian ini menggunakan teori Edward III tentang variabel implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BOS pada jenjang sekolah menengah di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu belum berjalan efektif. Hal ini terlihat dari pemanfaatan dana BOS yang belum mampu meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sesuai dengan standar pendidikan. Implementasi program BOS belum berjalan efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, disebabkan oleh, yaitu a) komunikasi; sosialisasi program BOS belum dilaksanakan secara optimal. Di samping itu, Juknis BOS sering mengalami pergantian; b) sumber daya; SDM pengelola BOS belum memiliki kemampuan dalam mengelola dana BOS, baik pada tahap perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban. Demikian pula dengan fasilitas pendukung, khususnya fasilitas IT dan sumber informasi sekolah yang masih terbatas; c) disposisi; motivasi dan kemampuan pelaksana program BOS yang masih rendah menyebabkan upaya menjadikan BOS sebagai modal bagi sekolah untuk meningkatkan pelayanan pendidikan masih belum terwujud; d) struktur biokrasi; koordinasi antara pihak yang terlibat dalam program BOS masih belum optimal, pada saat yang bersamaan Juknis sebagai acuan dalam penggunaan BOS sangat mengikat dan kaku, sementara masing-masing sekolah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan sekolah. Rekomendasi penelitian ini adalah 1) Perlu dilakukan peningkatan sosialisasi program BOS; 2) Sekolah perlu dilengkapi dengan SDM yang memadai 3) Implementor diharapkan dapat menunjukan motivasi yang tinggi dalam melaksanakan program BOS, 4) Peningkatan koordinasi antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS.

Kata Kunci :Implementasi Kebijakan, Program BOS, Pendidikan Menengah.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran penting dalam memajukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Sejalan dengan itu, pemerintah menetapkan visi pendidikan nasional yaitu mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Keseriusan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan pendidikan diwujudkan dengan mengalokasikan 20% total APBN untuk bidang pendidikan. Alokasi dana tersebut diperuntukkan guna membiayai penyelenggaraan pendidikan baik secara fisik maupun non fisik. Salah satu program pemerintah dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di sekolah adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program BOS didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Adapun definisi BOS berdasarkan PP tersebut adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.

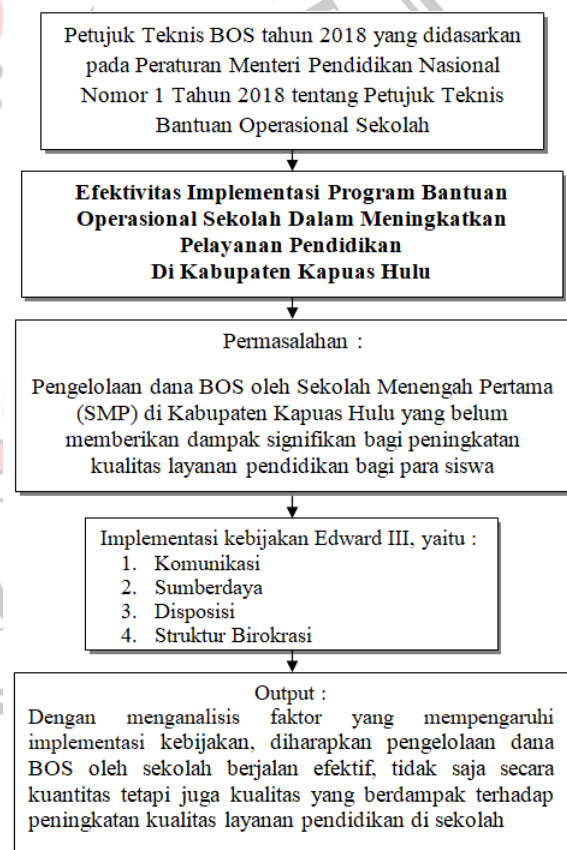
Bagi penyelenggara pendidikan di berbagai level mulai dari SD sampai dengan SMA, BOS dirasakan sangat membantu guna memenuhi standar pendidikan khususnya dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Alokasi BOS yang diberikan kepada pihak sekolah menuntut adanya peran serta dari komponen sekolah untuk dapat mengelola dana BOS secara profesional, transparan dan akuntabel. Paling tidak melalui dana BOS, tidak seluruh siswa mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama di sekolah. Berkaitan dengan penggunaan BOS, PP 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, biaya telekomunikasi, pajak dll.

BOS sebagai salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Sekalipun sudah memberikan manfaat dalam membantu penyediaan berbagai kegiatan untuk mendukung operasional sekolah. Permasalahan ini salah satunya dijumpai di Kabupaten Kapuas Hulu. Sekalipun sudah dikucurkan dana BOS, layanan pendidikan masih belum sesuai dengan harapan.

Berdasarkan data dan informasi yang penulis himpun terkait dengan pengelolaan BOS di beberapa sekolah di Kabupaten Kapuas Hulu, menunjukkan bahwa terdapat beberapa sekolah dalam pengelolaan dana BOS untuk keperluan sekolah tetapi layanan pendidikan kepada siswa masih belum memuaskan. Dalam pengertian bahwa dana BOS berhasil diserap untuk berbagai keperluan sesuai dengan ketentuan juklak BOS, akan tetapi dalam kaitannya dengan layanan pendidikan oleh sekolah kepada peserta didik masih kurang memuaskan.

Tidak hanya itu, beberapa sekolah yang terlalu khawatir dalam penggunaan dana BOS, sehingga penggunaan dana untuk investasi pendidikan di sekolah hanya diperuntukkan untuk pemenuhan program kegiatan yang terukur dan tidak mengandung resiko. Hal inilah yang menyebabkan apa yang menjadi tujuan akhir BOS masih belum terwujud. Permasalahan urgen dalam penelitian ini adalah belum tercapai hasil yang maksimal dari pengelolaan dana BOS Sekolah, sehingga hasil penggunaan dana BOS belum memberikan manfaat signifikan bagi pelayanan pendidikan yang sesuai dengan standarisasi pendidikan. Pelayanan pendidikan tersebut baik dari segi prasarana dan sarana sekolah, maupun peningkatan kualitas guru melalui dana BOS.

Kondisi tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak permasalahan yang terdapat dalam implementasi program BOS di Kabupaten Kapuas Hulu. Pengelolaan dana BOS masih banyak yang tidak sesuai dengan harapan guna pemenuhan sarana pendidikan di sekolah yang lebih baik lagi. Permasalahan ini sekaligus mengindikasikan bahwa dalam implementasi program BOS di Kabupaten Kapuas Hulu masih terdapat berbagai persoalan yang belum memperlihatkan dampak akhir kebijakan yang diharapkan.



Alur Kerangka Pikir

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

deskriptif. Menurut Sugiyono (2003:11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variable satu dengan variabel yang lain. Selanjutnya Nazir (1998:63) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Mengacu pada definisi penelitian deskriptif tersebut, dalam penelitian ini akan digambarkan secara komprehensif berbagai fenomena dan fakta mengenai efektivitas implementasi pengelolaan dana BOS oleh pihak sekolah dalam meningkatkan pelayanan pendidikan.

Objek penelitian ini adalah efektivitas implementasi pengelolaan dana BOS oleh pihak sekolah dalam meningkatkan pelayanan pendidikan.

Sesuai dengan objek penelitian, maka subyek penelitian yang dipilih sebagai informan adalah orang-orang yang penulis nilai menyimpan informasi dan

memiliki kapabilitas untuk menjawab pertanyaan mengenai efektivitas implementasi pengelolaan dana BOS oleh pihak sekolah dalam meningkatkan pelayanan pendidikan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.
- b. Kepala Sekolah,
- c. Pengawas Sekolah
- d. Peserta didik
- e. Komite sekolah

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Dokumentasi,

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif deskriptif. Maksudnya adalah data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis secara kualitatif yakni mendeskripsikan secara mendalam dan obyektif sehingga dapat diperoleh pemahaman dan kesimpulan yang tepat dan obyektif sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis ini mengacu pada pandangan Miles dan Huberman (1992: 15-20) dengan prosedur : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data (Miles

dan Huberman, 1992:16) dapat dipahami sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan-catatan di lapangan. Reduksi data merupakan suatu analisis dengan menggolongkan, mengklasifikasikan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat diperoleh dan diverifikasi.

C. PEMBAHASAN

Komunikasi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (mis komunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan. Transmisi dalam penelitian ini berhubungan erat dengan bagaimana ketentuan dalam program BOS, seperti Petunjuk Teknis (Juknis) dapat disampaikan secara berurutan dari pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai kepada sekolah. Melihat banyak, serta panjangnya struktur organisasi dalam program BOS, sangat mungkin informasi yang disampaikan oleh implementor di tingkat pusat mengalami kendala untuk diteruskan

kepada birokrasi di tingkat bahwa sejalan dengan itu, untuk mengetahui sejauhmana sosialisasi tentang program BOS ditransmisikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu, berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu

”program BOS disosialisasikan oleh pemerintah pusat sejak awal kebijakan ini diluncurkan, akan tetapi karena setiap tahun terjadi perubahan Juklak dan Juknis, maka setiap tahun diadakan sosialisasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku pelaksana BOS di tingkat Kabupaten, selanjutnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan menyampaikan informasi BOS kepada setiap sekolah”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu, menunjukkan bahwa sosialisasi terhadap program BOS sudah ditransmisikan dengan baik kepada pihak-pihak terkait. Sosialisasi terhadap program BOS khususnya tentang Juklak dan Juknis BOS selanjutnya diteruskan kepada pihak sekolah yang menerima program BOS.

Untuk mengetahui sejauhmana penerimaan pihak sekolah atau Tim BOS Sekolah berkenaan dengan sosialisasi program BOS, diperlukan keterangan langsung dengan Kepala SMPN 1

Putussibau dan SMPN 8 Putussibau. Sejalan dengan itu, dari hasil wawancara penulis dengan Kepala SMPN 1 Putussibau, diperoleh penjelasan yaitu : "sosialisasi program BOS oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu dilaksanakan pada saat bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban". Sementara Kepala SMPN 08 Putussibau berkaitan dengan sosialisasi BOS, memberikan penjelasan sebagai berikut : "sosialisasi BOS dilaksanakan langsung melalui tatap muka oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan melibatkan Koordinator Pendidikan Kecamatan tentang ketentuan-ketentuan dalam Juknis BOS, sosialisasi tersebut membahas Petunjuk Teknik Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS); Manajemen pengelolaan BOS; dan Kebijakan program BOS."

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah Penerima BOS yang dalam Juknis sebagai penanggungjawab BOS di Sekolah menunjukkan bahwa sosialisasi program BOS sudah diterima oleh langsung secara berjenjang. Berdasarkan keterangan tersebut, menunjukkan bahwa komunikasi Program BOS sudah ditransmisikan dengan baik. Kondisi ini menyebabkan penyampaian informasi kepada Tim Bos Sekolah sebagai target group kebijakan

dapat berjalan dengan baik. Tim BOS mendapatkan informasi yang jelas mengenai persyaratan dan mekanisme dalam perencanaan, pembelanjaan dan pertanggungjawaban BOS. Proses sosialisasi yang intens, meskipun melewati beberapa jenjang/tingkatan pelaksana dapat disampaikan dengan baik kepada sekolah sebagai pengelola BOS.

Berkaitan dengan konsistensi dalam sosialisasi program BOS, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu memberikan penjelasan sebagai berikut :

"kalau menyangkut konsistensi tentang BOS, dapat kita katakan bahwa selama ini program BOS sangat sering berganti-ganti Juklak dan Juknisnya. Hampir setiap tahun pemerintah pusat pasti melakukan revisi terhadap Juknis BOS. Belum sepenuhnya juknis lama dipahami oleh pihak sekolah, juknis BOS sudah diperbaharui lagi. Sementara sebagai pelaksana ditingkat bahwa, kita dipaksa untuk mengikuti Juknis yang baru".

Penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas Hulu memberikan gambaran bahwa sosialisasi terhadap program BOS terkendala oleh konsistensi pemerintah terkait program BOS tersebut, yang menyangkut Juknis BOS. Mengimplementasikan program yang

terpusat dengan berbagai ketentuan yang mengikat memerlukan adanya pemahaman yang utuh dari implementor program. Tim BOS sekolah yang terdiri dari Kepala Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah dengan kompleksitas tugas rutinnya tentu tidak dapat dengan mudah memahami Juknis BOS secara utuh, apalagi jika Juknis itu sering berganti-ganti.

Berdasarkan penjelasan tersebut, sangat jelas bahwa salah satu aspek dari komunikasi yang menyangkut petunjuk-petunjuk pelaksana adalah persoalan konsistensi. Adanya keputusan-keputusan yang bertentangan akan membingungkan dan menghalangi staf administrasi dan menghambat staf administrasi serta menghambat kemampuan mereka untuk melaksanakan tugas secara efektif. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan), karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Konsistensi dari komunikasi akan membantu komunikasi yang disampaikan sehingga dapat mudah dimengerti oleh penerima komunikasi. Penerima komunikasi juga dapat memahami maksud dan tujuan yang sedang dibicarakan. Konsistensi komunikasi dapat mencegah timbulnya kebingungan dari pihak

pelaksana kebijakan di lapangan.

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan selalu menghalangi implementasi pada tataran tertentu, untuk itu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

Terkait dengan kejelasan program BOS, dari keterangan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu diperoleh informasi sebagai berikut : ”mengenai informasi program BOS yang tertuang dalam Juknis BOS sudah sangat jelas, karena diatur secara terperinci tentang pembagian tugas setiap Tim BOS dari pusat sampai Tim BOS Sekolah, pemanfaatan dana BOS, larangan penggunaan dana BOS, mekanisme penyaluran, serta pertanggungjawaban”.

Penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu menunjukkan bahwa program BOS sudah disosialisasikan dengan jelas, dengan alasan bahwa Juknis sebagai panduan dalam penggunaan dana BOS sudah mengatur secara jelas dan

terperinci mengenai hal-hal yang harus dilakukan dalam program BOS. Kendati demikian, Juknis BOS yang sudah diatur secara terperinci tidak menjadi jaminan bahwa implementor ditingkat bahwa paham dengan Juknis tersebut. Untuk itu sosialisasi program BOS perlu dilaksanakan dengan baik kepada Tim BOS Sekolah, karena bagaimanapun mereka memiliki peran penting dalam penggunaan dana BOS untuk peningkatan pelayanan pendidikan.

Untuk mengetahui pemahaman Tim BOS Sekolah terhadap sosialisasi Juknis, dari keterangan hasil wawancara dengan Koordinator Pendidikan Kecamatan Putussibau Utara diperoleh keterangan sebagai berikut :

”sosialisasi selama ini dapat dikatakan cukup intens, setiap ada perubahan Juknis pasti diadakan sosialisasi kepada Tim BOS Sekolah, namun demikian untuk masalah pemahaman dapat dikatakan bahwa tidak semua Juknis itu dapat dipahami dengan cepat oleh Tim BOS Sekolah, terutama untuk hal-hal yang berkenaan dengan penyusunan RKAS dan Laporan Pertanggungjawaban. Hampir rata-rata sekolah memiliki permasalahan yang sama”.

Penjelasan yang dikemukakan oleh Koordinator Sekolah yang memiliki tugas untuk melaksanakan pendampingan dan

pengawasan BOS di Sekolah, menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan terhadap Juknis BOS belum sepenuhnya efektif dalam rangka menumbuhkan pemahaman Tim BOS di Sekolah terhadap penyusunan RKAS dan Laporan Pertanggungjawaban. Tidak mengherankan jika pada akhirnya banyak ditemui sekolah yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban BOS.

Umumnya sekolah berdalih bahwa mereka kesulitan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dikarenakan laporan pertanggungjawaban itu terlalu teknis dan harus terperinci. Sementara selama ini kadang kala sekolah menggunakan dana BOS diluar perencanaan, karena ada hal yang sifatnya mendesak. Pada saat yang bersamaan, tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini SDM pengelola BOS di Sekolah tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam menyusun perencanaan dan melaporkan penggunaan dana BOS sebagaimana tertuang dalam Juknis.

Mengenai pemahaman Tim BOS Sekolah terhadap sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala SMPN 8 Putussibau, pada saat wawancara memberikan penjelasan sebagai berikut : ”sejauh ini BOS dapat dikelola dengan baik sebagaimana Juknis, akan tetapi ada

beberapa kendala dalam pengelolaan BOS, seperti dalam hal penyusunan laporan pertanggungjawaban, karena ada beberapa pembelajaran yang tidak tercatat dengan baik, dan tidak sesuai dengan perencanaan”.

Berangkat dari penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa terkait kejelasan dalam pengelolaan BOS, permasalahan tidak hanya sekedar kejelasan pada saat sosialisasi BOS, tetapi manajemen sekolah dalam pengelolaan BOS tersebut yang belum berjalan efektif. Kemampuan Tim BOS Sekolah untuk menggunakan dana BOS sesuai dengan prinsip BOS menyebabkan pada saat penyusunan laporan pertanggungjawaban terkadang mengalami keterlambatan. Permasalahan ini mempertegas bahwa dalam hal pelaksanaan BOS diperlukan tidak hanya kejelasan dalam sosialisasi Juknis BOS, tetapi juga kemampuan SDM Tim BOS Sekolah untuk memahami Juknis tersebut secara utuh dan komprehensif.

Sumber Daya

Untuk melaksanakan program BOS, diperlukan adanya sumber daya yang dapat menggerakkan implementor dalam mengelola BOS. Sumber daya dimaksud dalam penelitian ini antara lain yaitu Sumber Daya Manusia (SDM)/Implementor, prasarana dan sarana, pendanaan, serta sumber kewenangan.

Implementasi program BOS harus ditunjang dengan SDM yang memadai, secara khusus SDM dimaksud adalah Tim BOS Sekolah yang terlibat langsung dalam pengelolaan BOS meliputi perencanaan, pembelanjaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Tuntutan akan adanya SDM yang berkualitas tersebut dikarenakan dalam Juknis BOS disebutkan bahwa dalam mengelola dana dilakukan secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan.

Selain kualitas SDM yang memadai, Jumlah SDM yang diperlukan dalam pengimplementasian kebijakan pada setiap lini sangat diperlukan (Arifin, 2020, Hal.201).

Mengenai kualitas pengelolaan dana BOS, berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Pendidikan Kecamatan Putussibau Utara, diperoleh penjelasan sebagai berikut : “SDM pengelolaan BOS di Sekolah perlu ditingkatkan lagi, sejauh ini masih ada kekurangan yang perlu dibenahi sesuai dengan Juknis”. Kualitas dalam kaitannya dengan manajemen berbasis sekolah adalah kemampuan dari SDM Sekolah dalam mengelola dana BOS secara mandiri dengan menyusun program-program sekolah untuk jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Oleh karena

itu, dalam perencanaan atau penyusunan RKAS, stakeholder sekolah diharapkan tidak hanya fokus pada penggunaan dana BOS untuk satu tahun anggaran, tetapi untuk beberapa tahun ke depan. Dalam hal inilah dibutuhkan kemampuan dari SDM sekolah untuk menyusun dokumen perencanaan sekolah.

Secara kuantitas pengelola BOS di SMPN 1 Putussibau dan SMPN 8 Putussibau sudah sangat lengkap, tetapi jika dikaitkan dengan kualitas, masih perlu ada tindakan perbaikan. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan juga adalah dukungan dari Komite Sekolah. Sejauh ini Komite Sekolah sudah berpartisipasi dalam pengelolaan dana BOS baik pada saat perencanaan, penggunaan dana BOS maupun dalam pertanggungjawaban, tetapi kontribusi dalam bentuk sumbangan sarana dan jembatan antara sekolah dengan masyarakat masih belum optimal.

Sumber daya lainnya selain ketersediaan personil dalam proses implementasi kebijakan BOS adalah tersediannya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan oleh implementor untuk memperlancar tugas dan tanggungjawab mereka. Pentingnya sarana dan prasarana/fasilitas sebagaimana dikemukakan oleh Edward III bahwa implementor mungkin memiliki staf yang

mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Untuk mengetahui dukungan sarana pendukung dalam implementasi program BOS pada jenjang sekolah menengah di Kabupaten Kapuas Hulu, penulis melakukan wawancara dengan Kepala SMPN 1 Putussibau. Dalam wawancara diperoleh informasi sebagai berikut : “dukungan sarana selama ini cukup baik, fasilitas yang dimiliki oleh SMPN 1 cukup membantu dalam pengelolaan BOS, seperti fasilitas IT untuk menginput dan mengupdate data sekolah di dapodik”.

Sementara itu, dari hasil wawancara dengan Kepala SMPN 8 Putussibau berkenaan dengan dukungan sarana prasarana dalam pelaksanaan program BOS memberikan penjelasan sebagai berikut : “fasilitas untuk mendukung pengelolaan dana BOS sudah cukup baik, sudah tersedia fasilitas seperti komputer untuk menyusun RKAS dan membuat laporan pertanggungjawaban BOS”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa sekolah sudah dilengkapi dengan fasilitas pendukung staf sekolah dalam mengelola BOS. Dukungan fasilitas ini juga tidak

lepas dari manfaat program BOS yang salah satunya digunakan untuk membenahi fasilitas sekolah. Pengelolaan BOS yang baik tentu saja harus dilengkapi dengan sistem informasi sekolah yang baik, yaitu seluruh data dan dokumen sekolah terekam dalam soft dan hard file. Penggunaan IT dalam pengelolaan BOS merupakan salah satu tolak ukur bahwa sekolah dalam pengelolaan BOS sudah menerapkan manajemen berbasis sekolah.

Penggunaan fasilitas IT untuk mendukung pengelolaan BOS juga harus diimbangi dengan adanya kemudahan akses informasi pengelolaan BOS. Sejalan dengan penerapan manajemen berbasis sekolah, maka sudah sepatutnya setiap tahapan dalam program BOS mulai dari perencanaan, pembelanjaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan secara transparan. Transparan dalam hal ini adalah dapat diakses secara terbuka oleh stakeholder sekolah.

Mengenai transparansi tersebut, terlihat bahwa sekolah yang diteliti masih belum menunjukkan transparansi dalam pengelolaan BOS. Hal ini dibuktikan dengan pelaporan penggunaan dana BOS yang masih bersifat manual/konvensional, yaitu ditampilkan di papan pengumuman sekolah. Sementara untuk akses melalui fasilitas IT masih belum terwujud. Pemanfaatan jaringan internet dalam

pengelolaan BOS masih belum terlihat, sekalipun sekolah sudah memiliki jaringan internet tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal untuk pengelolaan BOS yang lebih akuntabel dan transparan.

Implementasi program BOS juga memerlukan dukungan dana, sekalipun dalam hal ini program BOS adalah bantuan dana kepada sekolah. Namun dalam penggunaan dana tersebut, ada batasan-batasan tertentu yang tentu saja memerlukan dukungan dana dari pihak lain. Sebagaimana diketahui bahwa dalam program BOS, sekolah mendapatkan dana, tidak berarti bahwa sekolah dilarang menerima dana dari masyarakat, termasuk orang tua murid. Sekolah tetap boleh menerima dana dengan catatan bahwa dana tersebut merupakan sumbangan sukarela dari masyarakat dan bukan paksaan.

Penjelasan hasil wawancara menunjukkan bahwa BOS sudah memberikan manfaat bagi sekolah, karena program BOS membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan sekolah yang selama ini sangat tergantung dari iuran siswa. Namun demikian, ketergantungan dengan dana BOS menyebabkan upaya sekolah untuk meningkatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan standar pendidikan sulit terwujud. Sekolah tidak akan didukung dengan dana sukarela dari masyarakat, karena masyarakat sudah

menilai bahwa dana BOS dapat memenuhi semua kebutuhan sekolah. Apalagi jika lingkungan sekolah tersebut sebagian besar kondisi sosial ekonomi masyarakat menengah ke bawah.

Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, diperlukan juga sumber daya dalam bentuk kewenangan bagi para implementor untuk dapat mengambil keputusan yang sifatnya urgen, atau diluar ketentuan. Kewenangan akan memberikan keleluasaan bagi implementor untuk menyesuaikan kondisi yang dihadapi dalam melaksanakan suatu kebijakan. Dalam kaitannya dengan implementasi program BOS, kewenangan yang diberikan kepada implementor baik di tingkat Kabupaten (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) maupun di tingkat sekolah (Tim BOS) berasal dari pemerintah pusat. Sebagaimana tertuang dalam Juknis bahwa program BOS ini struktur organisasinya berjenjang mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai sekolah.

Implementasi program BOS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lebih banyak sebagai pengawas dan penanggungjawab program. Sementara yang mengeksekusi program untuk memenuhi kebutuhan sekolah adalah Tim BOS Sekolah. Apabila terdapat permasalahan dalam pengelolaan BOS sekolah, maka Dinas hanya bisa mengarahkan dan memberikan

pendampingan. Akan tetapi efektif tidaknya BOS sangat tergantung dari kemampuan Tim BOS sekolah dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kewenangan yang dimiliki pihak sekolah sangat penting agar BOS berjalan efektif. Untuk mengetahui sejauhmana kewenangan yang dimiliki oleh pihak sekolah dalam mengelola BOS, berikut keterangan hasil wawancara dengan Kepala SMPN 1 Putussibau : “sejauh ini kewenangan yang diberikan kepada Tim BOS di Sekolah dalam mengelola dan BOS sangat mengikat dan tidak fleksibel, setiap tindakan mulai dari tahap perencanaan, pembelanjaan sampai pertanggungjawaban harus sesuai dengan Juknis. Sekolah tidak dapat membelanjakan dana BOS di luar Juknis, sementara kebutuhan yang bersifat prioritas di sekolah itu berbeda-beda”.

Penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa sekolah selaku implementor di tingkat bawah menilai kewenangan yang mereka miliki sangat terbatas. Bahkan dapat dikatakan bahwa pengeluaran dan BOS sekolah harus menyesuaikan juknis bukan menyesuaikan kebutuhan hasil dari perencanaan. Tidak mengherankan apabila terdapat kebutuhan sekolah untuk meningkatkan proses belajar mengajar pada akhirnya tidak dapat diatasi, sekalipun dalam hal ini sekolah memiliki anggaran

dana BOS.

Disposisi

Disposisi mengandung makna kecenderungan atau tingkah laku dari para implementor dalam melaksanakan suatu kebijakan. Keberhasilan implementasi sebuah program dilihat dari variabel disposisi adalah sejauhmana kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan suatu program/kebijakan. Sehubungan dengan implementasi program BOS, maka implementor program harus memiliki pengetahuan dan kemauan yang baik agar BOS terlaksana sesuai Juknis dan bermanfaat serta berdampak positif terhadap penyelenggaraan pendidikan, khususnya pelayanan pendidikan.

Pengelolaan BOS yang berbasis MBS menuntut sekolah untuk lebih terbuka dan partisipatif dalam mengelola BOS. Dengan demikian, kemampuan dalam berkolaborasi menjadi sangat penting, tidak saja dengan stakeholder sekolah, tetapi juga dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Koordinator Pendidikan. Sehubungan dengan kemampuan Tim BOS Sekolah dalam pelaksanaan program BOS, dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu, diperoleh penjelasan sebagai berikut : “kalau untuk hal teknis, semisal dalam penggunaan dana BOS sudah menunjukkan kemampuan dalam

pengelolaan BOS, akan tetapi perlu ditingkatkan agar BOS itu benar-benar didasarkan pada rencana kerja yang merupakan hasil evaluasi setiap tahun, sehingga BOS itu memenuhi transparansi dan akuntabilitas”.

Sementara itu, dari hasil wawancara dengan Koordinator Pendidikan Kecamatan Putussibau Utara menyangkut kemampuan Tim BOS di Sekolah, khususnya Sekolah Menengah Pertama memberikan penjelasan sebagai berikut : “kemampuan pengelolaan BOS tiap sekolah bervariasi, termasuk juga didalamnya partisipasi Komite Sekolah. Setiap tahun ada peningkatan kemampuan pengelolaan BOS, sehingga kesalahan bisa diminimalisir, hanya saja persoalan transparansi masih perlu ditingkatkan”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 2 (dua) orang informan yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan monitoring program BOS tersebut, menunjukkan bahwa dari aspek kemampuan sekolah dalam mengelola BOS sudah menunjukkan peningkatan, yang artinya sudah ada perbaikan dalam mengelola BOS dari tahun ke tahun. Hanya saja kemampuan dalam pengelolaan BOS masih pada level teknis, dan itupun masih ada kelemahan khususnya dalam hal transparansi penggunaan dana BOS. Keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban dan juga kesalahan

dalam penyusunan laporan menjadi indikator kelemahan dalam pengelolaan BOS.

Berbicara mengenai kemampuan dalam pengelolaan BOS, tentu saja diperlukan informasi langsung dari pengelola BOS Sekolah, guna mengetahui sejauhmana mereka dapat mengelola BOS secara professional menggunakan MBS. Dalam wawancara dengan Kepala SMPN 1 Putussibau, diperoleh informasi sebagai berikut : “kekurangan dalam pengelolaan BOS masih ada, tetapi setiap tahun selalu diperbaiki. Sekolah terbuka terhadap berbagai masukan baik dari guru, Komite Sekolah maupun orang tua murid.”

Sementara dari hasil wawancara dengan Kepala SMPN 8 Putussibau, perihal kemampuan dalam pengelolaan BOS, memberikan penjelasan sebagai berikut : “kalau mengenai BOS kita upayakan agar setiap tahun ada perbaikan, walaupun pengelolaan BOS ini sangat ketat, dan perlu waktu dan kemampuan, sementara selama ini sekolah juga disibukkan dengan kegiatan belajar mengajar yang juga perlu tenaga dan pemikiran”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari pihak sekolah sebagai pelaksana program BOS, menunjukkan bahwa mereka menyadari masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan BOS. Tentu saja hal ini

bersinggungan dengan penggunaan BOS yang sesuai Juknis. Menerapkan BOS yang sesuai Juknis bukanlah pekerjaan mudah, apalagi jika SDM pengelola BOS terbatas. Seperti telah disebutkan pada penjelasan terdahulu bahwa pengelolaan BOS menerapkan MBS, yang artinya program BOS ini beranjak dari adanya data dan informasi dalam bentuk dokumen hasil dari evaluasi tahunan sebagai input dalam menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Mengenai hal tersebut, terlihat bahwa dalam pengelolaan BOS, sekolah belum sepenuhnya beranjak dari hasil evaluasi dalam penyusunan rencana kerja tahunan. Selama ini rapat BOS yang diselenggarakan hanya untuk membahas kebutuhan sekolah untuk 1 (satu) tahun anggaran, tetapi tidak bersumber dari suatu dokumen evaluasi diri sekolah. Penerapan MBS dalam pengelolaan BOS sejauh ini dari pengamatan penulis masih belum sesuai dengan kemampuan SDM di sekolah.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan instrumen yang penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Struktur birokrasi menggambarkan arah hubungan, garis komando dan pola koordinasi antar unit

kerja dalam organisasi. Aspek-aspek yang terkait dengan struktur birokrasi antara lain adanya Standar Operasional Prosedur (SOP). Dan selanjutnya adalah frakmentasi yaitu upaya penyebaran pola hubungan kerja antar bagian dalam organisasi dan ketersediaan aturan yang jelas mengenai wewenang dan tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas petugas diantara beberapa unit organisasi.

Dalam implementasi kebijakan, variabel penting yang perlu diperhatikan adalah adanya pembagian tugas/kerja setiap jenjang unit organisasi, sehingga terlihat kejelasan tentang arah dan tanggungjawab masing-masing pihak. Di samping itu, pembagian tugas juga menghindari adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan. Demikian pula dalam pelaksanaan program BOS kejelasan akan pembagian tugas sangat penting agar setiap pihak yang terlibat dapat mendukung dan berpartisipasi aktif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk mengetahui sejauhmana kejelasan dalam pembagian tugas pelaksanaan BOS, sebagaimana ketentuan dalam Juknis tersebut. Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam wawancara diperoleh penjelasan sebagai berikut : “berdasarkan juknis BOS, bahwa pembagian struktur

keanggotaan dan pembagian tugas dalam program, BOS sudah sangat jelas, tinggal bagaimana masing-masing pihak memahami dan melaksanakan kewajiban tersebut”.

Berdasarkan penjelasan Kepala Dinas dan juga ketentuan yang tertuang dalam Juknis, terlihat bahwa pembagian tugas dari setiap implementor yang terlibat dalam program BOS sudah sangat jelas, juknis telah mengatur apa yang harus dilaksanakan serta hal-hal yang dilarang, dalam kapasitasnya sebagai pengelola BOS.

Mengenai tanggapan dari Tim BOS Sekolah tentang pembagian tugas dan tanggungjawab dalam program BOS, dari keterangan Kepala SMPN 1 Putussibau memberikan penjelasan sebagai berikut : “sudah sangat jelas apa yang harus dilaksanakan oleh Tim BOS Sekolah, dan terlihat bahwa tanggungjawab Sekolah cukup besar dalam pengelolaan dana BOS”. Sementara pertanyaan yang sama disampaikan kepada Kepala SMPN 8 Putussibau diperoleh penjelasan sebagai berikut : “saya rasa sudah jelas, tetapi perlu ada pendampingan dari Dinas agar sekolah dalam melaksanakan BOS dengan baik”.

Keterangan yang disampaikan oleh informan di atas, menunjukkan bahwa pembagian tugas dalam pelaksanaan BOS sudah jelas. Artinya dalam Juknis BOS

telah mengatur tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh setiap pihak, tanpa ada tugas yang masih membingungkan atau ambigu. Ada hal penting dari pernyataan yang disampaikan oleh Kepala SMPN 1 Putussibau, karena dibalik kejelasan tugas dalam program BOS tersebut, tersimpan beban yang cukup berat. Tentu saja sebagaimana pernyataan Kepala SMPN 8 Putussibau bahwa dalam melaksanakan tugas mereka masih perlu pendampingan, karena bagaimana pun dalam pengelolaan dana BOS diperlukan kemampuan dalam bidang manajemen keuangan/akutansi yang selama ini bukan keahlian dari para guru di sekolah yang tergabung dalam Tim BOS.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

penulis akan menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

a. Implementasi program BOS pada jenjang sekolah menengah di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu belum berjalan efektif, meskipun pelaksanaan BOS dalam pemanfaatan dana sudah sesuai harapan. Hal ini terlihat dari pemanfaatan dana BOS yang belum mampu meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sesuai dengan standar pendidikan yaitu standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan

prasarana, standar pengelola, standar pembiayaan pendidikan dan standar penilaian pendidikan.

b. Implementasi program BOS belum berjalan efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, disebabkan oleh beberapa proses sebagai berikut :

c. Komunikasi; sosialisasi program BOS belum dilaksanakan secara optimal oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada pihak sekolah, sehingga masih banyak ditemukan kesalahan dalam proses penyusunan RKAS, pembelanjaan dana BOS, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan Juknis. Sosialisasi selama ini masih bersifat umum dan parsial, sehingga pemahaman Tim BOS sekolah dalam pengelolaan dana BOS masih kurang. Di samping itu, faktor komunikasi dalam program BOS juga menyangkut konsistensi, karena Juknis BOS sering mengalami pergantian.

d. Sumber daya; sebagai dampak sosialisasi BOS yang belum optimal, sumber daya untuk mendukung program BOS khususnya SDM pengelola BOS juga belum memiliki kemampuan dalam mengelola dana BOS, baik pada tahap perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS yang

kurang sesuai dengan Juknis BOS. Guru dan staf administrasi sekolah yang kurang memiliki kemampuan dalam bidang akuntansi menyebabkan BOS belum terkelola dengan prinsip pengelolaan keuangan yang benar sebagaimana disebutkan dalam Juknis. Demikian pula dengan fasilitas pendukung, khususnya fasilitas IT dan sumber informasi sekolah yang masih terbatas, sehingga pengelolaan dan transparansi BOS masih belum optimal.

- e. Disposisi; motivasi dan kemampuan pelaksana program BOS yang masih rendah menyebabkan upaya menjadikan BOS sebagai modal bagi sekolah untuk meningkatkan pelayanan pendidikan masih belum terwujud. Hal ini dibuktikan dengan sosialisasi yang belum optimal serta kemampuan pengelolaan BOS yang masih kurang, sehingga belum mampu menjadikan BOS untuk membenahi berbagai kendala yang dihadapi sekolah dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan.
- f. Struktur biokrasi; koordinasi antara pihak yang terlibat dalam program BOS masih belum optimal, sehingga masih terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan, penggunaan dan pelaporan pertanggungjawaban BOS yang tidak sesuai dengan Juknis. Pada saat yang

bersamaan Juknis sebagai acuan dalam penggunaan BOS sangat mengikat dan kaku, sementara masing-masing sekolah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan sekolah. Kondisi ini mengakibatkan berbagai kebutuhan sekolah untuk meningkatkan pelayanan pendidikan melalui dana BOS menjadi terbatas.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, penulis memberikan rekomendasi dalam rangka mengefektifkan implementasi program BOS sehingga dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di Kecamatan Putussibau Utara sebagai berikut :

- a. Perlu dilakukan peningkatan sosialisasi program BOS oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu dengan melibatkan Koordinator Pendidikan kepada setiap sekolah jenjang SMP di Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya terhadap Juknis BOS. Sosialisasi dalam hal ini diharapkan dapat dilakukan secara merata ke semua sekolah penerima BOS, dengan metode ceramah dan simulasi. Artinya sosialisasi juga diikuti kegiatan pelatihan penyusunan RKAS, penggunaan atau pembelanjaan dana BOS serta penyusunan laporan pertanggungjawaban. Setelah sosialisasi

- dilaksanakan, perlu adanya monitoring dan pendampingan untuk memastikan bahwa penggunaan dana BOS benar-benar sesuai dengan ketentuan di dalam Juknis.
- b. Sekolah perlu dilengkapi dengan SDM yang memadai dalam pengelolaan BOS baik dari SDM maupun sarana dan prasarana. Untuk SDM Tim BOS sekolah perlu memiliki kemampuan dalam perencanaan sekolah untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Sekolah harus memiliki prediksi tentang kebutuhan sekolah yang akan datang. SDM Guru juga perlu didukung dengan staf administrasi yang memiliki kemampuan dalam penguasaan IT. Sementara dari fasilitas sekolah, tentu saja diperlukan adanya pembenahan fasilitas sekolah terutama IT untuk mendukung pengelolaan BOS yang transparan dan akuntabel dengan adanya sistem informasi yang baik dan up to date.
- c. Implementor program BOS, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu diharapkan dapat menunjukkan motivasi yang tinggi dalam melaksanakan program BOS, terutama dalam memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada seluruh sekolah menengah di Kabupaten Kapuas Hulu yang selama ini dirasakan masih kurang, agar Tim BOS sekolah memiliki kemampuan dalam mengelola BOS sesuai dengan Juknis. Hal ini juga berlaku bagi Tim BOS sekolah, yang diharapkan ikut ambil bagian dalam rangka mengelola BOS dengan baik sehingga pemanfaatan dana BOS benar-benar dapat bermanfaat untuk peningkatan pelayanan pendidikan bagi guru dan peserta didik.
- d. Agar program BOS dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan adanya peningkatan koordinasi antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu, Koordinator Pendidikan Kecamatan, Tim Bos Sekolah termasuk di dalamnya Komite Sekolah agar pengelolaan BOS dapat lebih optimal. Di samping itu, perlu adanya penyesuaian Juknis BOS yang tidak kaku dan berlaku untuk semua sekolah di Indonesia, karena Juknis BOS yang mengikat justru menjadi kendala bagi sekolah untuk membelanjakan dana BOS sesuai kebutuhan, karena ada ketentuan yang membatasi sebagaimana tertuang dalam Juknis BOS.

E. REFERENSI

Buku

Badjuri, Abdul Kahar dan Yuwono, Yuwono. 2003. *Kebijakan Publik*

- Konsep dan Strategis*. Semarang: UNDIP.
- Dunn, William. N.2003. *Analisa Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta: Hanindita.
- Faisal, Sanapiah. 1995. *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang: YA3.
- Gibson, dkk. 1997. *Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Indrawijaya, 1999. *Teori Organisasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, J Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Mohammad. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, D Riant, 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Steers, Richard. 2005. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Tachjan, H. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI-Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.
- Prawirosentono, Achmad. 1999. *Kinerja Organisasi Menghadapi Globalisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Warella Y, 2005. *Administrasi Negara dan Kualitas Pelayanan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Wibawa, Samodra. 2005. *Kebijaksanaan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia
- Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Dokumen**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
- Internet :**
- Arifin, A. 2020. “ Efektivitas Implementasi Penanggulangan Bencana Kabuat Asap di Kota Pontianak.” JPASDEV : Journal of Public Administration and Sociology of Development 1, N0.2 (2020) : 201. doi.: <http://dx.doi.org/10.2648/jpasdev.vli2.43654>
- <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/743>, diakses pada tanggal 20 Juli 2019, pukul 10.00 WIB